



Menurutnya, jika korban dengan dua indikator tersebut dibiarkan maka korban akan mengalami dampak yang tidak baik. "Karena kalau dibiarkan, akan mengalami penurunan mental dan menghambat pertumbuhan," kata perempuan yang akrab disapa Ana itu di sela pembukaan Lomba Fragmen Anti Kekerasan Perempuan dan Anak di Ruang Bima Balai Kota Jogja kemarin (28/11).

Istri Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti tersebut menuturkan, jika masyarakat mendapati kekerasan baik fisik, psikis, penelantaran maupun seksual agar melaporkan ke FPKK di tingkat kecamatan. Mereka juga melapor ke pihak terkait yakni Danramil, Kapolsek, pendampingan agama, organisasi lembaga swadaya masyarakat, dan universitas yang ada di sekitarnya. "Jadi, saya mohon untuk kesadaran supaya bisa menghentikan kekerasan di kota ini betul-betul dipahami," ujarnya.

Berdasarkan data dari Pemkot Jogja, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Jogja cenderung mengalami penurunan sejak 2015. Pada 2015 terdapat lebih dari 800 laporan kasus kekerasan terhadap

perempuan dan anak. Pada 2016, jumlah laporan berkurang menjadi 544 kasus.

Pada 2017, jumlahnya kembali berkurang menjadi 254 kasus. Pada 2018, tercatat ada 193 kasus.

Sedangkan hingga November 2019 ini tercatat ada 94 kasus yang dilaporkan. Jumlah tersebut terdiri dari 75 korban perempuan dan 19 korban laki-laki.

"Dua di antara itu ada korban anak masih di bawah usia SD. Saya selalu *lemes* kalau dengar anak-anak umur lima tahun jadi korban kekerasan," ungkap Ana.

Terkait lomba fragmen anti-kekerasan perempuan dan anak, Ana menyatakan, menjadi salah satu upaya kampanye pendekatan dan sosialisasi melalui seni maupun budaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kekerasan dan dampak yang ditimbulkan. Peserta bisa menjadi duta antikekerasan di wilayah masing-masing. "Kalau bisa ini diteruskan sampai ke wilayah. Harapan saya ada sebuah kebanggaan manakala kita bisa menunjukkan kehidupan yang baik tanpa kekerasan itu lebih nyaman dan lebih baik," ucapnya.

Dia menyampaikan, FPKK bersama Pemkot Jogja berkomitmen mengaplikasikan pembangunan

yang responsif gender. Melalui program lima afirmasi gender meliputi warga miskin, perempuan, lansia, anak, dan difabel.

Kebijakan tersebut merupakan rencana strategis Pemkot. Di mana, ada pengakuan bahwa ingin isu gender itu positif untuk pembangunan.

"Jadi, antikekerasan tidak hanya untuk perempuan dan anak saja. Tapi, semua sama menjadi skala prioritas kita," tambahnya.

Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perlindungan Perempuan dan Anak (DPMPPA) Kota Jogja Bebasari Sitarini mengatakan, lomba fragmen tersebut digelar sebagai rangkaian peringatan hari antikekerasan. Lomba diikuti peserta dari 14 kecamatan.

Yunike Marsela, sutradara fragmen berjudul Perempuan-Perempuan Duka yang dibawakan tim Kecamatan Mengangsan, menyambut baik program FPKK dalam mengkampanyekan antikekerasan lewat seni dan budaya. "Ya, bagus menurut saya. Jadi, kampanye yang kami buat akan mudah diterima masyarakat. Kami juga sudah biasa melakukan kegiatan seni dan budaya di kampung kami. Jadi, ya nggak terlalu sulit bagi kami," ungkapnya. (cr15/umd/by)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas PMPPA	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 17 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005